

Komunikasi Pembangunan Partisipatif: Sebuah Pengenalan Awal

Hadiyanto

Bagian Komunikasi dan Penyuluhan, Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi manusia IPB, hadiyan03@yahoo.com

1. Pendahuluan

Istilah Komunikasi Pembangunan Partisipatif (Kombangpar) mungkin masih terasa asing, bahkan di kalangan akademisi dan praktisi komunikasi pembangunan sendiri di Indonesia. Sebab sekalipun konsep, model, dan penerapannya sudah dikembangkan beberapa dekade lalu namun wacana tentang Kombangpar masih belum dilakukan secara meluas dan intens sampai saat ini. Momentum setengah abad embrio lahirnya Komunikasi Pembangunan, sejak pertama kali Daniel Lerner mempublikasikan hasil penelitiannya pada tahun 1958 (*The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle East*) dapat pula dijadikan sebagai tonggak penting untuk mulai memahami, mengkaji dan mencari relevansinya bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Indonesia yang sampai saat ini masih belum beruntung karena struktur sosial dan sistem yang kurang berpihak kepada mereka.

Sesungguhnya istilah Kombangpar digunakan sebagai padanan dari *Participatory Development Communication* yang sudah populer pada pertengahan tahun 1990-an (Bessette dan Rajasunderam, 1996; Bessette, 2004; 2006). Konsepsi lain yang terkait dengan lahirnya Kombangpar adalah *Participatory Communication* atau *Participatory Communication for Social Change* (Servaes et al., 1996; Servaes, 2002a; Kim, 2005). Gagasan tersebut muncul sejalan dengan mulai bergesernya paradigma komunikasi pemba-

ngunan dari paradigma difusi ke paradigma pemberdayaan. Sekaligus merupakan sebuah alternatif pilihan untuk menjawab kurangnya kontribusi komunikasi pada pembangunan di Negara-negara berkembang selama masa dekade pembangunan pertama yang pernah dicanangkan PBB yang banyak menaruh harapan besar pada komunikasi massa sebagai agen perubahan seperti yang pernah dipromosikan oleh Schramm (1964)

Seperti diakui oleh Rogers sendiri, tokoh pencetus teori Difusi Inovasi, paradigma pembangunan yang diterapkan pada dasa warsa 60-an ternyata tidak memberikan dampak yang diharapkan, karena hanya sedikit saja yang telah dicapai. “*Penampilan yang mengecewakan dari paradigma yang dominan selama satu dasa warsa membawa kita untuk mempertimbangkan berbagai konsepsi alternatif mengenai komunikasi dalam pembangunan,*” demikian ungkap Rogers (1976). Pada masa itulah mulai ada pengakuan yang meluas di antara praktisi dan perencana pembangunan bersamaan dengan menguatnya isu-isu pemerataan, pengentasan kemiskinan, desentralisasi, lingkungan hidup, dan keadilan. Komunikasi Pembangunan Partisipatif diyakini sebagai “*sebuah pendekatan yang paling menjanjikan untuk mengurangi ketergantungan, membangun rasa percaya diri dan kemampuan sendiri masyarakat*” (Rajasunderam, 1996). Munculnya Kombangpar dipicu pula oleh mulai bergesernya kebijakan pembangunan

yang menitikberatkan pada ekonomi kepada pembangunan yang berpusat pada manusia yang dipromosikan oleh PBB dan sudah diadopsi secara meluas (Korten & Klauss, 1984; Cernea, 1988). Ukuran keberhasilan pembangunan pun tidak lagi hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, tetapi juga dilengkapi dengan indeks pembangunan manusia (*human development index*).

Bessette (2004) lebih lanjut mengungkapkan bahwa pengalaman (*lesson learned*) di masa lalu menunjukkan, pentingnya menitikberatkan pada proses-proses interaktif dan partisipatif, ketimbang produksi dan diseminasi informasi yang terpisah dari proses-proses masyarakat. Artinya perlu adanya pergeseran atau perubahan paradigma di dalam memandang komunikasi dalam konteks pembangunan saat ini. Bersamaan dengan semakin mudarnya paradigma dominan kini muncul harapan baru, di mana komunikasi lebih diarahkan pada proses-proses yang memungkinkan pihak *beneficiaries* lebih aktif dilibatkan (*involving the community*) dan proses pembangunan itu sendiri harus dimulai dari rakyat (*putting people first*) sebagai spirit utamanya.

2. Asal-Usul Lahirnya Kombangpar

2.1 Kontribusi Paulo Freire

Secara historis, gagasan lahirnya Kombangpar antara lain diilhami oleh pemikiran intelektual dari Amerika Latin terutama Paulo Freire, kemudian diikuti oleh Luis Ramiro Beltran, dan Juan Diaz Bordenave. Mereka beranggapan bahwa paradigma modernisasi “tidak relevan” atau bahkan membahayakan. Tokoh-tokoh ini terkenal dengan pemikirannya yang kritis dan radikal. Istilah *Participatory Communication* sendiri pertama kali digunakan secara resmi dalam sebuah seminar di

Amerika Latin pada tahun 1978 yang disponsori oleh *Center for Advanced Studies and Research for Latin America* (Huesca, 2002).

Seperti diungkapkan Thomas (2002) bahwa komunikasi partisipatif berkaitan dengan akses terhadap pembangunan dan pendekatan hak asasi manusia dalam pembangunan yang berakar dari teori Paulo Freire (pendidik dari Brazil) di samping beberapa eksperimen tentang komunikasi alternatif yang muncul di akhir 60-an dan 70-an. Menurut Robert Huesca, Freire telah mendekonstruksi dan menolak paradigma komunikasi pembangunan yang bersifat vertikal, top-down, linier, dan searah (Huesca, 2002). Freire sendiri antara lain menegaskan bahwa secara individual ataupun bersama-sama menyuarakan kata-katanya adalah hak semua orang, bukan hanya untuk beberapa orang saja (Freire, 1972). Masyarakat marjinal dan masyarakat desa selama beberapa dekade tidak mampu menyuarakan aspirasi, kehendak dan permasalahannya sendiri karena mereka termasuk kelompok “*voiceless people*.” Pendekatan ini secara tegas meyakini bahwa partisipasi masyarakat dalam komunikasi sangat vital demi keberhasilan setiap proyek yang ada. Ia didasari usaha secara sadar (melalui proses penyadaran) untuk melibatkan masyarakat dalam membangun diri sendiri dan manajemen diri (Thomas, 2002; Servaes, 2002a). Paulo Freire sendiri sebenarnya lebih menaruh perhatian pada bidang pendidikan, sebagaimana dituangkan dalam bukunya yang sangat populer (*Pedagogy of the Oppressed*). Akan tetapi ia justru memberikan kontribusi paling berharga dalam memaknai komunikasi sebagai proses “penemuan diri” melalui dialog yang bebas dan proses penyadaran.

2.2 Kontribusi Beltran

Luis Ramiro Beltran adalah intelektual Amerika Latin lainnya yang memberikan tanggapan kritis terhadap model penelitian komunikasi dan penerapannya yang “diimpor” dari Amerika Serikat, karena ternyata tidak cocok diterapkan di Amerika Latin yang memiliki keadaan sosial, budaya dan ekonominya yang sangat berbeda. Model atau pendekatan Difusi Inovasi Rogers misalnya, menurut Beltran (1976) sangat tidak peka terhadap faktor-faktor konteks dan struktur sosial dalam masyarakat.

Beltran (1976) lebih lanjut menulis:
“Salah satu asumsi dasar pendekatan difusi ialah bahwa komunikasi dengan sendirinya bisa menggerakkan pembangunan, tanpa memandang kondisi-kondisi sosial, politik dan ekonomi. Asumsi lainnya ialah bahwa peningkatan produksi dan konsumsi barang-barang dan jasa merupakan hakekat pembangunan, dan bahwa pembagian yang adil dalam pendapatan dan kesempatan perlu dicapai dalam waktu yang telah diperhitungkan. Asumsi ketiga ialah bahwa kunci terhadap peningkatan produktivitas itu adalah inovasi teknologi, tanpa memandang siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan.”

Seperempat abad kemudian, Beltran (2004) sampai pada kesimpulan bahwa, sebenarnya ada tiga konsepsi yang menonjol bila membicarakan hubungan antara komunikasi (sosial) dengan pembangunan nasional berdasarkan pengalaman di Amerika Latin, sebagaimana tercermin dalam istilah yang digunakannya. *Pertama* adalah *Development Communication* (Komunikasi Pembangunan) yang secara esensi memandang bahwa media massa mampu menciptakan situasi yang mendukung perubahan di masyarakat

sebagai syarat mutlak untuk memodernisasi masyarakat tradisional melalui penyebaran teknologi (inovasi) dan pertumbuhan ekonomi. Konsepsi inilah yang kemudian dipandang sebagai paradigma dominan.

Kedua, *Development Support Communication* (Komunikasi Penunjang Pembangunan) suatu pendekatan komunikasi yang terencana dan terorganisir, baik masif maupun tidak, yang merupakan instrumen kunci bagi tercapainya tujuan-tujuan praktis dari proyek pembangunan yang spesifik. Konsepsi ini pula yang digunakan oleh lembaga-lembaga internasional, antara lain UNESCO, UNICEF dan FAO dalam melaksanakan program-programnya di negara-negara berkembang.

Ketiga, *Alternative Communication for Democratic Development* yang didasarkan pada anggapan bahwa dengan memperluas akses rakyat dalam proses komunikasi secara seimbang, baik melalui media massa maupun komunikasi interpersonal di aras “akar rumput,” maka pembangunan akan lebih terjamin kesinambungannya, di samping tercapainya perolehan material, keadilan sosial, dan kebebasan untuk semua. Pendekatan ini sejalan dengan pendapat Beltran (1976) sebelumnya yang mengungkapkan bahwa pada prinsipnya, pendekatan baru dalam komunikasi berakar pada pemahaman komunikasi secara integral dan dinamis sebagai suatu proses di mana semua komponen harus diperhatikan secara seimbang. Proses ini terjalin secara tak terpisahkan dari struktur masyarakat. Tampak bahwa konsepsi yang terakhir inilah yang memberi pengaruh tidak langsung dan sejalan dengan konsepsi Kembangpar.

2.3 Kontribusi Bordenave

Menurut Bordenave (1976), seperti juga yang diungkapkan Beltran, ilmu komunikasi berkembang dari konsep informasi dan pengaruh linier yang sederhana ke arah pandangan yang kompleks terhadap komunikasi sebagai komponen sosial yang dinamis. Juan Diaz Bordenave, yang banyak diilhami pemikiran Paulo Freire, juga menyoroti model Difusi Inovasi, suatu komunikasi yang menekankan pada isi atau *content*.

Juan Diaz Bordenave merupakan salah satu intelektual yang secara kreatif mengaplikasikan gagasan Freire tentang pendidikan ke dalam disiplin komunikasi. Menurut Bordenave (1976), apa yang disarankan Paulo Freire adalah penghapusan “mentalitas transmisi” (*transmission model of communication*) dalam pendidikan dan komunikasi, dan menggantinya dengan tipe komunikasi dan pendidikan yang lebih membebaskan, yang berisi lebih banyak dialog, lebih berpusat pada penerima dan lebih sadar akan struktur sosial. Untuk itu dibutuhkan konseptualisasi yang lebih memadai tentang peranan inovasi teknologi dalam proses pembangunan pedesaan yang murni, terpadu, dan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat.

Bordenave (1976) menulis:

“Kita harus menolak kecenderungan lama yang menganggap bahwa adopsi inovasi teknologi merupakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan proses pembebasan dan emansipasi sebagian besar penduduk. Ideologi baru ini akan memaksa kita untuk lebih memusatkan perhatian pada pemakai inovasi dan mengurangi perhatian pada kelompok-kelompok, lembaga-lembaga, dan saluran-saluran yang berkepentingan agar inovasi mereka diadopsi.”

Akhirnya, Bordenave menegaskan bahwa komunikasi pasti bisa menolong petani melahirkan aspirasi dan motivasinya, memperoleh akses dalam informasi dan pengetahuan, dan mempelajari “*know-how*” apa yang diperlukan untuk mengadopsi inovasi. Akan tetapi komunikasi sendiri tidak bisa membekali dengan apa yang diperlukan, yaitu kekuasaan dan alat untuk melaksanakan tindakan. Ini merupakan masalah politis yang harus dipecahkan oleh para petani, ilmuwan-ilmuwan yang merasa terpanggil, serta agen-agen perubahan, melalui pemikiran yang terang, keberanian pribadi, dan tindakan yang mantap.

Pemikiran ini yang selanjutnya membawa pada satu asumsi bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan hanya mungkin terpenuhi bila ada redistribusi kekuasaan secara adil dan kepercayaan kepada masyarakat, termasuk kaum miskin sekalipun, bahwa mereka sesungguhnya dapat dan mampu menolong dirinya sendiri menuju kehidupan yang lebih baik apabila diberi kesempatan, baik dengan bantuan ataupun tanpa bantuan pihak luar.

3. Pengertian dan Konsepsi Kombangpar

Komunikasi Pembangunan Partisipatif (Kombangpar) sebagai pendekatan alternatif dapat dipandang sebagai “sarana ampuh” untuk memfasilitasi proses-proses partisipatif bila sejalan dengan dinamika pembangunan di tingkat lokal. Pada sisi lain, Kombangpar dapat pula diterjemahkan sebagai suatu aktifitas yang direncanakan dengan matang yang diwujudkan dalam bentuk strategi dan pendekatan komunikasi yang diterapkan dalam seluruh proses pembangunan.

Definisi yang lengkap antara lain dikemukakan oleh Bessette (2004) sebagai berikut:

'Komunikasi Pembangunan Partisipatif adalah suatu aktifitas yang direncanakan yang didasarkan pada proses-proses partisipatif di satu sisi, dan pemanfaatan media komunikasi dan komunikasi tatap-muka di sisi lain, dengan tujuan untuk memfasilitasi dialog di antara pemangku kepentingan yang berbeda, yang berkisar pada perumusan masalah atau sasaran pembangunan bersama, mengembangkan dan melaksanakan atau menjabarkan seperangkat aktifitas yang memberi kontribusi untuk mencari solusi yang didukung bersama.

Proses-proses partisipatif yang dimaksud adalah adanya partisipasi komunitas, yakni adanya keterlibatan aktif kelompok komunitas yang berbeda, bersama-sama pemangku kepentingan lainnya dan beberapa agen pembangunan serta peneliti yang bekerja dengan komunitas serta para pengambil keputusan. Secara umum yang dimaksud dengan pemangku kepentingan antara lain anggota komunitas (masyarakat), kelompok-kelompok masyarakat yang aktif, aparat pemerintah lokal atau regional, LSM, petugas teknis pemerintah atau lembaga lainnya yang bekerja di tingkat komunitas, para pembuat kebijakan yang semestinya terlibat dalam upaya pembangunan yang berlangsung.

Makna komunikasi sendiri mengalami perubahan karena adanya pergeseran peran dari yang fokusnya menginformasikan dan membujuk rakyat untuk mau mengubah perilaku atau sikap, kepada menyediakan fasilitas di antara pemangku kepentingan yang berbeda untuk menentukan masalah bersama. Artinya dari pendekatan *top-down*, linier dan searah menuju pendekatan horisontal, interaktif dan dialogis. Komunikasi menjadi lebih ber-

orientasi kepada *receiver* (khalayak penerima) ketimbang kepada *sender* (sumber). Proses ini dapat berlangsung ketika yang menjadi titik masuknya adalah bukan hanya pada masalah pembangunan itu sendiri, tetapi sasaran atau tujuan yang ditentukan bersama di tingkat komunitas (Servaes & Malikhao, 2002).

Pergeseran makna komunikasi memberi konsekuensi pada peranan baru komunikasi yang lebih ditekankan pada kebutuhan untuk membantu seluruh proses melalui pertukaran informasi secara interaktif atau transaksional. Rakyat (komunitas) sendiri yang semestinya mengidentifikasi kebutuhan akan informasi dan komunikasi. Rakyat diposisikan sebagai mitra sejajar dalam mengembangkan pesan dan memproduksi media komunikasi. Melalui komunikasi partisipatif pula dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik di antara kelompok, komunitas dan pemangku kepentingan lainnya.

Apakah Perbedaan Kombangpar dengan strategi komunikasi lainnya? Dagron (2001) menyimpulkan bahwa perbedaan paradigmatis antara Kombangpar dan strategi komunikasi pembangunan lainnya mencakup antara lain pada beberapa isu berikut:

1. *Komunikasi Horisontal vs Vertikal*; Rakyat adalah aktor yang dinamis, aktif terlibat dalam proses perubahan sosial dan turut mengendalikan cara-cara komunikasi dan isi komunikasi, alih-alih sebagai penerima informasi dan petunjuk-petunjuk berperilaku yang pasif, sementara orang lain yang membuat keputusan kehidupan mereka.
2. *Proses vs Kampanye*; masa depan rakyat berada di tangan mereka sendiri melalui proses-proses dialog dan partisipasi secara demokratis dalam merencanakan aktifitas komunikasi, bukan pada kampanye dari atas yang mahal dan tidak ber-

- kesinambungan untuk memobilisasi rakyat namun tidak membangun kapasitas pada aras atau tingkat bawah untuk menanggapi kebutuhan akan perubahan.
3. *Jangka panjang vs Jangka pendek*; komunikasi dan pembangunan secara umum dipandang sebagai proses jangka panjang sehingga butuh waktu untuk diterima rakyat, bukan perencanaan untuk jangka pendek yang kurang sensitif terhadap lingkungan budaya setempat dan seringkali lebih memperhatikan “hasil.”
 4. *Kolektif vs Individual*; Untuk menghindari resiko hilangnya “kekuaasaan” kepada beberapa orang saja, komunitas urban atau desa bertindak secara kolektif untuk memenuhi kepentingan mayoritas, daripada rakyat menjadi target secara individual yang terpisah dari komunitasnya dan bentuk pembuatan keputusan komunal.
 5. *Dengan vs Untuk*; meneliti, mendesain dan mendiseminasikan pesan dengan melibatkan rakyat, bukan sekadar untuk rakyat. Cara pandang ini memungkinkan terintegrasinya pengetahuan lokal yang biasanya lebih ramah terhadap alam dan lingkungan hidup setempat ke dalam sistem pengetahuan yang lebih universal.
 6. *Spesifik vs Masif*; proses komunikasi disesuaikan dengan komunitas atau kelompok sosial tertentu, baik menyangkut isi, bahasa, budaya maupun media yang digunakan, bukan menggunakan teknik, media dan pesan yang sama untuk kelompok yang memiliki budaya dan kondisi sosial yang berbeda.
 7. *Kebutuhan rakyat vs Keharusan donor*; dialog berbasis komunitas dan cara-cara komunikasi ditujukan untuk membantu mengidentifikasi, mendefinisikan perbedaan antara *felt needs* dan *real needs*, bukan atas kehendak pihak donor yang didasarkan kepentingan donor.
 8. *Kepemilikan vs Akses*; proses komunikasi merupakan “hak rakyat” yang dimiliki untuk memberikan kesempatan yang sama pada komunitas, bukan sekadar memberikan akses yang dikondisikan oleh faktor-faktor sosial, politik atau agama.
 9. *Penyadaran vs Persuasi*; Proses untuk mencapai penyadaran dan pemahaman yang mendalam tentang realitas sosial, masalah dan solusinya, bukan persuasi untuk mengubah perilaku jangka pendek yang hanya bertahan dengan kampanye berkesinambungan.
- Yoon (1996) menyatakan bahwa dengan menerapkan Kombangpar memungkinkan; (1) terjadinya komunikasi personal yang dialogis antara masyarakat dan agen pembangunan desa, (2) pemanfaatan media tradisional atau media rakyat yang lebih intensif, (3) tumbuhnya aktifitas sosial secara berkelompok, (4) dan berkembangnya media komunitas. Sedangkan Servaes (2002a) menegaskan pada sebagian besar bentuk partisipasi komunikasi adalah manajemen diri. Prinsip ini bermakna adanya hak untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan produksi isi media, sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi komunitas lokal. Servaes (2002b) menyebutkan Komunikasi Pembangunan Partisipatif sebagai model partisipatif dalam komunikasi dan pembangunan yang pada dasarnya merupakan “*organic model*” sebagai lawan dari “*mechanistic model*” dari teori difusi inovasi. Keduanya merupakan dua kutub dari suatu kontinum, yang bermakna di antara keduanya terdapat variasi yang merupakan

kombinasi dari kedua model tersebut.

4. Penutup

Komunikasi Pembangunan Partisipatif sebagai pendekatan memberikan harapan baru dalam memposisikan kembali peranan komunikasi dalam pembangunan yang lebih menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat yang selama ini masih dalam posisi “tertinggal.” Akan tetapi pendekatan ini akan menemui kegagalan yang sama dengan pendekatan yang lama bila tidak terpenuhinya prasyarat berikut:

1. Perlunya ditumbuhkan keyakinan bahwa setiap individu atau kelompok yang secara potensial akan dipengaruhi program pembangunan harus diberikan hak untuk berpartisipasi secara penuh dalam membuat keputusan. Masyarakat tidak diposisikan sebagai obyek pembangunan tetapi diperlakukan sebagai subyek yang aktif dalam seluruh proses yang disebut dengan pembangunan. Perubahan sudut pandang ini mensyaratkan adanya kerelaan dari pihak pemerintah, lembaga donor, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam kegiatan pembangunan untuk berbagi kekuasaan.
2. Komunikasi Pembangunan Partisipatif harus menjamin terwujudnya kerjasama timbal balik pada seluruh tingkatan partisipasi. Artinya setiap pihak selalu berusaha mendengarkan apa yang orang lain katakan, menghargai dan menghormati sikap orang lain, serta memiliki rasa saling percaya. Hal ini bermakna bahwa bila selama ini proses komunikasi selalu berorientasi kepada sumber perlu diubah menjadi komunikasi yang berorientasi kepada khalayak. Kelemahan di masa lalu antara lain terlalu berpusat kepada media (*media centric*),

sementara dalam komunikasi partisipatif lebih berpusat pada penciptaan “makna bersama” artinya menitikberatkan pada tercapainya konsensus atau kesepakatan.

3. Komunikasi Pembangunan Partisipatif harus mampu menempatkan semua pihak sebagai partisipan yang setara sehingga tidak ada dominasi dalam arus informasi dari salah satu pihak saja (misalnya peneliti dan aparat pemerintah). Masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, peneliti, dan praktisi pembangunan misalnya sama-sama memposisikan dirinya sebagai aktor komunikasi. Dengan kata lain setiap pemangku kepentingan adalah mitra sejajar yang memiliki semangat untuk saling berbagi.
4. Melalui Kambangpar keputusan-keputusan dihasilkan secara demokratis melalui proses interaksi dan transaksi secara terus-menerus sehingga komitmen bersama dapat terus dipertahankan. Pendek kata komunikasi yang berlangsung harus dalam suasana dialogis dan terbuka. Bebas dari tekanan pihak lain adalah prasyarat lain agar pengambilan keputusan memuaskan semua pihak yang terlibat, tidak ada yang lebih diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Semua pemangku kepentingan dapat mengambil manfaat sesuai dengan kontribusinya secara adil.
5. Komunikasi Pembangunan Partisipatif harus mampu membuka akses dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan semua media komunikasi yang tersedia. Artinya media dituntut untuk menyediakan pelayanan publik dengan menyediakan program-program dan ruang publik lainnya yang dibutuhkan masyarakat serta tersedianya sarana untuk memberikan umpan balik untuk menyalurkan

reaksinya terhadap pesan-pesan media (terutama media komunikasi modern).

Daftar Pustaka

- Beltran, L.R. 1976. Alien premises, objects, and methods in latin American communication research. In Rogers (Ed). *Communication and Development: Critical perspectives*. Edisi Indonesia diterjemahkan oleh Dasmar Nurdin. 1985. *Komunikasi dan Pembangunan: Perspektif Kritis*. LP3ES. Jakarta.
- Beltran, L.R. 2004. *Communication For Development in Latin America: A Forty-Year Appraisal*. <http://www.southbound.com.my/communication/cul-ch.htm>.
- Bessette, G. 2004. *Involving the Community: A Guide to Participatory Development Communication*. Southbound, Penang. Malaysia-IDRC. Kanada
- Bessette, G. Ed. 2006. *Participatory Development Communication for Natural Resource Management*. International Development Research Centre. Ottawa, Kanada.
- Bordenave, J.D. 1976. *Komunikasi Inovasi Pertanian di Amerika Latin: Perlunya Model-model Baru*. In Rogers (Ed). *Communication and Development: Critical perspectives*. Edisi Indonesia diterjemahkan oleh Dasmar Nurdin. 1985. *Komunikasi dan Pembangunan: Perspektif Kritis*. LP3ES. Jakarta.
- Cernea, M.M. 1988. *Putting People First*. Terjemahan: B.B. Teku. Penerbit UI Press. Jakarta.
- Colle, R. 2002. *Threads of Development Communication*. Dalam. Servaes. Ed. *Approaches to Development Communication*. Part I. Unesco, Paris.
- Dagron, G.A. 2001. *Making waves: stories of participatory communication for social change: Participatory Communication Case Studies*. Rockefeller Foundation.
- Freire, P. 1972. *Pedagogy of the Oppressed*. Edisi Indonesia diterjemahkan oleh Utomo Dananjaya, Mansour Fakhri, Roem Topatimasing & Jimly Assiddiqie. 1985. LP3ES. Jakarta.
- Huesca, R. 2002. *Tracing the History of Participatory Communication Approaches to Development: A Critical Appraisal*. dalam: Servaes, J. Ed. 2002. *Approaches to Development Communication*. UNESCO. Paris.
- Kim, Y.Y. 2005. *Inquiry in Intercultural and Development Communication*. Volume 55, Nomor 3. September 2005.
- Korten, D.C. & R. Klauss. 1984. *People Centered Development. Contributions toward Theory and Planning Frameworks*. Kumarian Press. West Hartford, Connecticut.
- Rajasunderam, CV. 1996. *A Canadian-African Dialogue in Participatory Development Communication*. Dalam G. Bessette & CV. Rajasunderam, Ed. 1996. *Participatory Development Communication. A West African Agenda*. IDRC, Kanada.
- Richards, M. 2001. *The Freirean Legacy, Development, Communication, and Pedagogy*. dalam: Richards, M., P.N. Thomas, & Z. Naim. 2001. *Communication and Development: The Freirean Connection*. Hampton Press, Inc. Cresskill, New Jersey.
- Rogers, E.M. 1976. *The Passing of the Dominant Paradigm – Reflections on Diffusion Research*. Dalam: W. Schramm & D. Lerner. 1976. *Communication and Change: The*

- Last Ten Years- and the Next. The University Press of Hawaii.
- Schramm, W. 1964. Mass Media and National Development. Stanford University Press. Stanford, California.
- Servaes, J., T.L. Jacobson & S.A. White. 1996. Participatory Communication for Social Change. Sage Publication, Ltd. London.
- Servaes, J. 2001. Participatory Communication research for Democracy and Social Change. *dalam*: Richards, M., P.N. Thomas, & Z. Naim. 2001. Communication and Development: The Freirean Connection. Hampton Press, Inc. Cresskill, New Jersey.
- Servaes, J. 2002a. By Way of Introduction. *dalam*: Servaes, J. Ed. 2002. Approaches to Development Communication. UNESCO. Paris.
- Servaes, J. 2002b. Communication for Development Approaches of Some Governmental and Non-Governmental Agencies. *dalam*: Servaes, J. Ed. 2002. Approaches to Development Communication. UNESCO. Paris.